MEMAKNAI HUKUM DALAM KEUTUHAN ONTOLOGIKNYA
(Suatu Kajian Historis)

Oleh : Umbu Lily Pekuwali

ABSTRAK

Pada era globalisasi sekarang ini hukum harus diposisikan bermakna untuk manusia, atau hukum adalah untuk manusia. Oleh karena itu, titik tolak semua teorisasi hukum pada dasarnya berporos pada satu hal, yaitu 'hubungan manusia dan hukum'. Interessenjurisprudenz, Sociological Jurisprudence dan Realistic Jurisprudence yang dalam perkembangannya disebut hukum responsif dan akhir-akhir ini disebut hukum progresif.

Kata Kunci : Hukum untuk Manusia, Hukum Responsif dan Hukum Progresif

PENDAHULUAN

“Hukum adalah untuk manusia”. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Oleh karena itu, titik tolak semua teorisasi hukum pada dasarnya berporos pada satu hal, yaitu 'hubungan manusia dan hukum'. Semakin landasan suatu teori bergeser ke faktor peraturan, maka semakin ia menganggap hukum sebagai unit tertutup yang formal-legalistik. Sebaliknya, semakin bergeser ke manusia, semakin teori itu terbuka dan menyentuh mosaik sosial Kemanusiaan. Tipe yang pertama melahirkan doktrin-doktrin hukum seperti misalnya legalisme (di zaman klasik), positivisme hukum atau Ideenjurisprudenz (abad ke-19) dan rechtsdogmatiek atau analytical jurisprudence (era kontemporar). Sedangkan tipe yang kedua me lahirkan antara lain teori tentang nomos dan keadilan (zaman klasik), Frei Rechtslehre dan Historism (awal abad ke-20), Interessenjuris prudenz, Sociological Jurisprudence dan Realistic Jurisprudence (abad...
ke-20), teori-teori hukum kritis\(^{57}\) (critical legal theories) serta hukum responsif dan hukum progresif (era kontemporer).

Tipe hukum yang disebutkan di atas sering diperdebatkan dan perdebatan ini terus terjadi dan belum menemukan titik temu. Dua kubu sering saling mengingkari seolah yang satu lebih benar dari yang lain. Ada kecendrungan, mungkin karena fanatisme masing-masing kubu mengklaim mati-matian metode idamannya, tanpa pernah memperbincangkan secara serius teba (objek) telaahnya.

Dalam catatan sejarah perdebatan antara kedua kubu itu dimulai sejak abad 19 saat-saat awal munculnya Sosiologi Hukum (Sociology of law) di Eropa yang dimotori oleh Karl Marx, Henry S. Maine, Emile Durkheim dan Max Weber\(^{58}\).

PEMBAHASAN

1. Hukum itu Poly-Ontologik
   Ilmu hukum sering dipahami sekedar ilmu tentang peraturan (segi formal-legalistik aturan). Dipahami sebatah rechtsdogmatiek, sebuah ilmu praktis yang normologi\(^{59}\). Konsepsi seperti ini memang tidak seluruhnya salah. Sesuai namanya, hukum memang menyangkut peraturan. Tetapi, identifikasi hukum sebagai soal formal-legalistik aturan \textit{per se}, hanya salah satu ris di pemikiran tentang hukum\(^{60}\). Di samping segi formal peraturan, orang masih berbicara tentang muatan nilai dari peraturan itu, berikut roh dan summum bonum-nya\(^{61}\).

Sejak tahun 600 Sebelum Masehi hingga kini, konsepsi ontologik hukum memang tidaklah tunggal. Pada awal sekali, hukum dilihat sebagai kekuatan. Hukum merupakan produk 'nafsu' orang kuat. Ini dikemukakan oleh kaum filsuf generasi pertama seperti Anaximander. Kemudian Hera kleitos (eksponen kemudian dari generasi itu) melihat hukum sebagai bagian dari logos semacam roh ilahi yang memandu manusia pada hidup yang patut. Esensi hukum sebenarnya, soal kepatutan. Ya,

kepatutan yang dapat diterima akal sehat orang waras. Protagoras (wakil kaum Sofis, sekitar tahun 500-an Sebelum Masehi), juga menyatakan yang sama. Meski terjatuh pada pragmatisme, kaum sofis masih tetap mengidealikan hukum itu sebagai ‘buah’ logos (bukan produk nafsu).


Maka ius sebenarnya tidak sama dengan lege atau lex. Lege menunjuk pada aturan-aturan hukum yang faktaal ditetapkan, tanpa menyoalkan mutunya. Sedangkan ius menunjuk pada cita hukum yang harus tercermin dalam hukum sebagai hukum, yakni keadilan. Karena itu, ius tidak selalu bisa ditemukan dalam segala aturan hukum (lege/lex), “Das volk des rechts ist nicht das volk gesetzes” (bangsa hukum bukan bangsa undang-undang), demikian salah satu adagium Romawi.


Immanuel Kant mengaitkan hukum dengan imperatif kategoris. Ada dua prinsip di sini. Pertama, hukum itu benar jika buatannya dapat berlaku sebagai kepatutan yang bersifat ‘universal’. Artinya, apa yang menjadi buat hukum itu “benar” apabila di manapun dan kapan pun adalah yang seharusnya dilakukan oleh siapa pun. Dan prinsip yang kedua, apa yang “benar” adalah apabila hukum mem perlakukan manusia, dalam setiap hal sebagai tujuan dan bukan sekedar sebagai alat. Dua prinsip itu lah yang dikenal dengan imperatif kategoris (kategorisher imperativa) Immanuel Kant. Menaati prinsip, bearti benar. Melanggar prinsip,


Oleh karena itu, muncul kehendak meninggalkan tradisi analitical jurisprudence atau rechts dogmatiek yang hanya me lihat ke dalam hukum dan menyibuk an diri dengan membicarakan dan me lakukan analisis ke dalam, khusus nya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Dunia di luar, seperti manusi, masyarakat, ke jejahteraan yang ditepis oleh analitical jurisprudence atau rechtsdogmatiek dirangkul kembali dalam pemikiran hukum. Di sinilah muncul gagasan Frei Rechtslehre, Interessenjuriprudenz, Sociological Jurisprudence, Realistic Jurisprudence, Hukum Responsif64 dan yang paling akhir adalah Hukum Progresif65.

Kiranya jelas, rechtsdogmatiek yang masih dianut kuat dalam dunia hukum di Indonesia, merupakan salah satu tipe saja dari sekian ragam pemikiran tentang hukum sepanjang peradaban manusia. Ia merupakan ciri pemikiran tipikal abad ke-19 dimana pengagungan otonomi individu, rasionalisme-dualisit dan nation state sedang berkobar. 66. Bahwa 'fossil' abad ke-19 itu masih kokoh-utuh diamini komunitas hukum dan akademikus di negeri yang sedang membangun dan sedang menghadapi keadaan serba darurat seperti Indonesia, memang dirasakan cukup mengganggu.

2. Normativisme Hukum


Aturan dari seorang tiran Hitler yang mengijinkan pembasian ras Yahudi misalnya, tidak memiliki nilai normatif apapun meski ia sah dan legal secara yuridis. Meski perintah Hitler merupakan kewenangan tertinggi bagi Nazi Jerman dan cita-cita Hitler itu menyerupai Grundnorm ala Kelsenian, namun ia tidak memiliki nilai normatif. Penolakan ini bukan lantara Hitler seorang yang kejam, tetapi semata-mata karena aturan yang demikian tidak memiliki sumnum bonum yang dapat diterima akal sehat orang waras.


Oleh karena itu, penglihatan terhadap hukum secara normatif mestinya diarahkan pada dimensi-

---

dimensi normatif dalam aturan tersebut, bukan melulu pada segi sah tidaknya aturan itu. Dengan mengarahkan pada segi normatif di atas, kita bisa menempatkan suatu aturan dengan melihat aspek normatif yang terkait dengan: Nomos (keteraturan), kebajikan, prinsip-prinsip keadilan (berikut varians-variannya), agama/reliji, moral, etika, demokrasi, pengem bangan pribadi individu, ke pentingan umum (rasionalisme Wolff, Realisme Amerika: Cardozo dan Pound), hak-hak dasar manusia (tradisi Inggris), penciptaan tatanan masyarakat yang baik sehingga hak-hak dasar manusia terjamin (Marx), usaha menjamin keadilan (Kant, Stammiler, Radbruch), men jaga keamanan (Hobbes), tingkat evolusi kehidupan sosial (Comte dan Spencer), jiwa bangsa (von Savigny), hukum alam (Pufendorf) dan lain sebagainya. Jadi, sekali lagi hukum tidak sekedar soal aturan legal-formal.

3. Cara Memaknai Hukum


Dalam situasi itu, unik dan individual! Demikian Fletcher67. Oleh karena itu, tidak ada hukum atau pedoman yang sudah siap pakai. Kita harus kreatif dan bijaksana menentukan langkah yang paling tepat untuk tiap situasi dan peristiwa. Mengajak sobat akrab bersantai di pinggir jalan sambil minum kopi bisa merupakan suatu kesalahan besar karena pada malam itu ia sedang belajar untuk ujian besok.

Bagaimana pun, harus diakui bahwa yang “benar” itu belum tentu “baik”. Penerapan hukum secara kaku tidak jarang justru berakibat buruk. Konon, di sebuah tempat terlihat seorang anak sedang mengerang kesakitan karena ter jatuh ke dalam liang karang yang berbahaya. Banyak orang jatuh iba tetapi tak seorang pun berani menolongnya, meski mereka se benarnya mampu menyelamatkan si anak itu. Sebab, hukum yang

berlaku di tempat itu melarang siapa pun selain petugas untuk masuk ke areal tersebut. Jalan satu-satunya adalah memanggil petugas, dan membiarkan si anak terkapar tidak berdaya hingga ajal menjemputnya.


Aliran-aliran tersebut memang mengandalkan pemeriksaan yang cermat dan serius atas kepentingan-kepentingan yang dipertaruhkan dalam suatu kasus konkret berikut konteksnya yang relevan. Kemudian dengan menimbang bobot kepentingan yang dianggap lebih utama, diambilah keputusan yang mendukung kepentingan yang lebih utama tersebut.

Sekalian aliran tersebut tegas-tegas menolak pertimbangan yuridis yang legalistik yang dilakukan secara pasang jarak dan in ab stracto. La tidak memulai pemeriksa an dari bangunan peraturan secara hitam putih, melainkan dari konteks dan kasus khusus di luar narasi tekstual aturan itu sendiri 68 sebab keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses legal-formal. Keadilan justru diperoleh lewat intuisi. Katanya, argumen-argumen logis-formal "dicari" sesudah keadilan ditemukan untuk membingkai secara yuridis-formal keputusan yang diyakini adil ter sebut.

Alkisah, seorang ibu dan bayinya berada dalam satu rombongan dengan puluhan orang lain melewati suatu daerah yang amat berbahaya oleh sebab ancaman orang-orang Indian Apache yang terkenal ganas. Persis di daerah yang rawan itu, si bayi yang kebetulan sedang sakit mulai rewel dan mau menangis keras. Sang ibu pun menghadapi dilema. Membiarakan si bayi menangis berarti mengundang bahaya dan seluruh rombongan terancam musnah. Tetapi membekap mulut nya, bayi itu akan mati pengap kehilangan nafas. Manakah yang harus dipilih si ibu? Menurut kisah, ibu itu memilih yang kedua. Dengan sangat berat hati ibu itu merelakan nyawa anaknya demi keselamatan seluruh rombongan. Salahkah tindakan ibu itu?

Bagi golongan legalisme, tindakan ibu itu tergolong salah, tidak benar. Ia telah membunuh secara sengaja. Salah adalah salah, titik. Tidak ada yang lebih besar.


Pemahaman melalui pengalaman, konteks dan situasi unik, seperti yang dihadapi sang ibu itu merupakan pusat perhatian Frei Rechtslehre, Interessenjuriprudenz, Sociological Jurisprudence, Realistic Jurisprudence, Hukum Responsif atau pun Hukum Progresif. Bagi Frei Rechtslehre (yang mengutamakan epiekeia ketimbang rumusan aturan hitam putih), tindakan si ibu itu merupakan langkah bijaksana yang dalam etika dikenal sebagai "jahat tetapi apa boleh buat" (necessary evil). The greatest good for the greatest number, demikian John Stuart Mill, sang filsuf Inggris yang kondang itu. Menurut Mill, sebuah tindakan dapat diakatakan "baik" apabila ia bertujuan dan berakibat "membawa kebaikan yang paling besar bagi sebanyak mungkin orang".

Demikian pula bagi Interessenjuriprudenz (yang meng utamakan timbangan antara kepen tingan), maka tindakan tersebut merupakan pilihan yang cerdas. Ketika ibu itu memilih yang jahat dari yang jahat, ia memilih kadar dan akibatnya lebih kecil (the lesser evil). Bagi Hukum Responsif dan Hukum Progresif (yang meng andalkan alak sehat dan empati), maka tindakan tersebut merupakan keputusan yang memberi agape - kasih kepada manusia yang penuh tepo saliro dan tanpa pamrih. "Man is more than constitution", demikian salah satu baris dari sajak JR. Lowell69, Rasanya kita setuju, bahwa hidup (human life) lebih berharga daripada konstitusi hukum.


69 Like Wilardjo. Mission Sacre. Artikel dalam Kompas, 4 April 1998

86
menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.


Semangat progresif itu semata-mata oleh karena *Frei Rechtslehre, Interessenjuriprudenz*, Hukum Responsif dan Hukum Progresif, melihat hukum bukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, kelompok aliran yang progresif itu meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* yang hanya melihat ke dalam hukum dan menyibukkan diri dengan membicarakan dan melakukan analisis ke dalam70 sementara dunia di luar seperti manusia, masyarakat, kesejahteraan, dapat ditepis ke luar71.

Meminjam istilah Nonet-Selznick, kelompok aliran yang progresif tersebut memiliki prioritas "the sovereignty of purpose"72. Itulah sebabnya aliran-aliran tersebut merupakan program dari *sociological jurisprudence* dan *realist jurisprudence/legal realism*. Dua aliran tersebut memang dikerangkaikan sebagai sebuah seruan untuk kajian hukum yang lebih empirik dengan fokus pada perluasan pengetahuan hukum dan peran kebijakan dalam putusan hukum. Dalam *sociological jurisprudence* dan *legal realism*, pemahaman orang mengenai hukum melampaui peraturan atau teks-teks dokumen dan "looking towards" proses, hasil, akibat dan manfaat dari hukum itu.

Ini penting sekali diperhatikan (utamanya oleh para akademisi hukum), oleh karena proses hukum tidak berhenti pada peraturan. Di samping peraturan, orang masih berbicara tentang struktur dan budaya hukum – dua unit dari apa yang disebut sistem hukum73. Cara yang membabi buta menempatkan aturan sebagai poros kajian ilmu hukum, secara langsung maupun tidak telah mengabaikan subsistem lain dari hukum itu sendiri: struktur hukum dan budaya hukum74. Tidak perlu kecerdasan khusus untuk menangkap keanehan ini. Akal sehat sederhana sekali pun dapat menggagat, mengapa dua hal itu (yang memiliki atribut hukum) justru tidak menjadi materi kajian ilmu hukum. Apakah memang ada perbedaan kualitas antara term hukum yang melekat pada unit "aturan hukum" (*legal substance*) dengan yang melekat pada unit "struktur hukum" (*legal structure*) dan unit "budaya hukum" (*legal culture*)? Kalau ya, di mana letak perbedaannya? Lalu apa gunanya kata hukum yang melekat pada dua subsistem itu? Ataukah pengabaian itu hanya lantaran karena dua subsistem yang disebut terakhir terbilih objek yang tidak dapat berwujud aturan formal – yang *coute que coute* – tidak mendapat tempat dalam teori dan metode dogmatik?


70 Ibid, hal 3-4
71 Ibid, hal 4
72 Phillippe Nonet & Phillip Selznick. Ibid, Hal 78


4. Hukum Berpusat pada Manusia


Dengan memahami hakikat ontologi hukum sebagai pergulatan manusia yang multi faset-dimensi-logika ini, maka mestinya perbantahan yang tidak produktif di kalangan pestudi hukum, bisa diakhiri. Seperti diketahui, komunitas hukum telah lama terdikotomi dalam model penerapan normatif versus empirik. Dua kubus sering terlibat perbantahan, saling mengingkari seolah yang satu lebih benar dari yang lain. Ada kecenderungan, mungkin karena fanatisme masing-masing kubu mengklaim mati-matian metode idamannya, tanpa pernah memperbincangkan secara serius teba (objek) telaannya.

Alhasil, ibarat orang memasuki lapangan tenis dengan perlengkapan untuk bermain sepak bola dan mencari-cari di mana letak gawangnya. Tentu saja yang terjadi adalah kekacauan. Tenis dan sepak bola adalah dua permainan yang tidak saja berbeda tetapi juga sekaligus memiliki aturan mainnya sendiri-sendiri. orang tidak mencetak gol di lapangan tenis, demikian pula sebaliknya.
Kesimpulan

Hukum seyoginya dimenger ti, dipahami dan dimaknai secara komprehensif, baik yang normatif, doktrinal maupun yang lebih telem logis dan kontekstual. Hanya dengan cara itulah hukum responsif dan hukum progresif dapat dicapai, yaitu melihat hukum bukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya, yaitu manusia. Dengan kata lain, hukum yang bermanfaat untuk manusia.

DAFTAR PUSTAKA


